

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Sektor Unggulan

Pengertian sektor unggulan biasanya berkaitan dengan suatu perbandingan, baik itu perbandingan berskala regional, nasional maupun internasional. Pada lingkup internasional, suatu sektor dikatakan unggulan jika sektor tersebut mampu bersaing dengan sektor yang sama dengan negara lain. Sedangkan pada lingkup nasional, suatu sektor dapat dikategorikan sebagai sektor unggulan apabila sektor di wilayah tertentu mampu bersaing dengan sektor yang sama yang dihasilkan oleh wilayah lain, baik di pasar nasional ataupun domestik. Suatu daerah akan mempunyai sektor unggulan apabila daerah tersebut dapat memenangkan persaingan pada sektor yang sama dengan daerah lain sehingga dapat menghasilkan ekspor (Suyanto, 2002).

Menurut Tumenggung (1996), Sektor unggulan adalah sektor yang memiliki keunggulan komperatif dan keunggulan kompetitif dengan produk sektor sejenis dari daerah lain serta memberikan nilai manfaat yang besar. Sektor unggulan juga memberikan nilai tambah dan produksi yang besar, memiliki multiplier effect yang besar terhadap perekonomian lain, serta memiliki permintaan yang tinggi baik pasar lokal maupun pasar ekspor.

Sektor unggulan dipastikan memiliki potensi lebih besar untuk tumbuh lebih cepat dibandingkan sektor lainnya dalam suatu daerah terutama adanya faktor pendukung terhadap sektor unggulan tersebut yaitu akumulasi modal, pertumbuhan tenaga kerja yang terserap, dan kemajuan teknologi (*technological*

progress), penciptaan peluang investasi juga dapat dilakukan dengan memberdayakan potensi sektor unggulan yang dimiliki oleh daerah yang bersangkutan. Sektor unggulan di suatu daerah (wilayah) berhubungan erat dengan data PDRB dari daerah bersangkutan (Rachbini, 2001).

B. Kriteria Penentuan Sektor Unggulan

Menurut Usya (2006), kriteria sektor unggulan yaitu: pertama, sektor unggulan memiliki laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Kedua, sektor unggulan memiliki angka penyerapan tenaga kerja yang relatif besar. Ketiga, sektor unggulan memiliki keterkaitan antara sektor yang tinggi baik ke depan maupun ke belakang. dan keempat, sektor yang mampu menciptakan nilai tambah yang tinggi.

Menurut Rachbini (2001) ada empat syarat agar suatu sektor tertentu menjadi sektor unggulan, yaitu:

1. Sektor tersebut harus menghasilkan produk yang mempunyai permintaan yang cukup besar sehingga laju pertumbuhan berkembang cepat akibat dari efek permintaan tersebut.
2. Karena ada perubahan teknologi yang teradopsi secara kreatif maka fungsi produksi baru bergeser dengan pengembangan kapasitas yang lebih luas.
3. Harus terjadi peningkatan investasi kembali dari hasil-hasil produksi sektor yang menjadi prioritas tersebut, baik swasta maupun pemerintah.
4. Sektor tersebut harus berkembang sehingga mampu memberi pengaruh terhadap sektor-sektor lainnya.

C. Pengaruh Sektor Unggulan dan Bukan Unggulan

Salah satu faktor dalam menentukan keberhasilan pembangunan ekonomi adalah dengan melihat pertumbuhan ekonominya. Dalam menyusun pembangunan daerah, pertumbuhan ekonomi yang tinggi menjadi target utama. Menurut Restiatun (2009), Pertumbuhan ekonomi yang ditandai dengan peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) diperlukan guna mempercepat struktur perekonomian yang berimbang dan dinamis bercirikan industri yang kuat dan maju, serta memiliki basis pertumbuhan sektoral yang seimbang. Dengan demikian pertumbuhan ekonomi menjadi gambaran kinerja dalam melakukan pembangunan.

Menurut Richardson (Tarigan 2005), suatu daerah atau wilayah harus mampu membuat sektor- sektor saling terkait dan saling mendukung dengan cara mensinergikan sektor-sektor. Pertumbuhan suatu sektor dapat mendorong pertumbuhan sektor lain. Sektor yang dimaksud disini adalah sektor unggulan (basis) dan bukan unggulan (non basis), Teori basis ekonomi mengungkapkan bahwa laju pertumbuhan ekonomi suatu wilayah ditentukan oleh besarnya peningkatan ekspor dari wilayah tersebut. Kegiatan ekonomi dikelompokkan atas kegiatan basis dan kegiatan non basis, Kegiatan basis adalah semua kegiatan baik penghasil produk maupun penyedia jasa yang mendatangkan uang dari luar wilayah. Lapangan kerja dan pendapatan di sektor basis adalah fungsi permintaan yang bersifat eksogen (tidak tergantung pada kekuatan internal/permintaan lokal, sedangkan kegiatan non basis adalah untuk memenuhi kebutuhan konsumsi lokal,

oleh karena itu permintaan sektor ini sangat dipengaruhi oleh tingkat kenaikan pendapatan masyarakat setempat.

D. Sektor Pertanian dan Subsektor Pertanian

Menurut Suhendara (2004), menyatakan bahwa sektor pertanian yang berhasil merupakan persyaratan bagi pembangunan sektor industri dan jasa. Para perancang pembangunan Indonesia pada awalnya masa pemerintahan orde baru menyadari benar hal tersebut, sehingga pembangunan angka panjang dirancang secara bertahap. Pada tahap pertama, pembangunan dititik beratkan pada pembangunan sektor pertanian dan industri penghasil sarana produksi pertanian. Pada tahap kedua, pembangua dititik beratkan pada industri pengolahan penunjang pertanian (*Agroindustri*) yang berkelanjutan secara bertahap dialihkan pada pembangunan industri mesin dan logam.

Sektor pertanian telah berperan dalam perekonomian nasional melalui pembentukan PDRB, perolehan devisa, penyediaan pangan dan bahan industri, pengetasan kemiskinan, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Sektor pertanian mempunyai efek pengganda kedepan yang besar melalui keterkaitan *input-output*, *outcome* antara industri, konsumsi, dan investasi. Hal ini terjadi nasional dan regional karena keunggulan komparatif sebagian besar wilayah Indonesia adalah sektor pertanian (Laoh, 2008).

Pertanian adalah macam produksi khusus yang didasarkan atas proses pertumbuhan tanaman dan ternak. Dengan kata lain pertanian merupakan suatu industri biologi, karena pertanian berproduksi menggunakan sumber daya alam

secara langsung, pertanian juga disebut industri primer. Tanaman merupakan pabrik primer pertanian, sedangkan ternak merupakan pabrik sekunder pertanian.

Disamping itu, pertanian juga merupakan suatu kegiatan biologis untuk menghasilkan berbagai kebutuhan manusia termasuk sandang, pangan, dan papan. Produksi tersebut dapat dikonsumsi langsung maupun jadi bahan antara untuk proses lebih lanjut. Sub pertanian merupakan semua kegiatan yang meliputi penyediaan komoditi tanaman bahan makanan, perkebunan, peternakan, kehutanan, dan perikanan (Statistik Pertanian, 2014). Sub sektor dari sektor pertanian mencakup:

1. Tanaman bahan makanan (Tabama) ialah tanaman yang menjadi bahan pokok atau utama dalam pola konsumsi manusia seperti beras, jagung, dan gandum.
2. Tanaman perkebunan seperti tanaman sayur-sayuran dan buah-buahan sebagai pelengkap dari pola konsumsi manusia.
3. Kehutanan adalah usaha tani dengan subjek tumbuhan (biasanya pohon) dan diusahakan pada lahan yang setengah liar atau liar (hutan).
4. Peternakan menggunakan subjek hewan darat kering (khususnya semua hewan vertebrata kecuali ikan dan amfibi) atau serangga (misalnya lebah).
5. Perikanan mempunyai subjek hewan perairan (termasuk amfibi dan semua non-vertebrata air).

E. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

PDRB merupakan indikator untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan pemerintah dalam memanfaatkan sumber daya yang ada, dan dapat digunakan sebagai perencanaan dan pengambilan keputusan (Juniarsih, 2012).

Menurut Badan Pusat Statistik (2017), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) diartikan sebagai nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik suatu negara yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang dimiliki residen atau non-residen. Penyusunan PDRB dapat dilakukan melalui 3 (tiga) pendekatan yaitu pendekatan produksi, pengeluaran, dan pendapatan yang disajikan atas dasar harga berlaku dan harga konstan (riil). PDRB atas dasar harga berlaku atau dikenal dengan PDRB nominal disusun berdasarkan harga yang berlaku pada periode penghitungan, dan bertujuan untuk melihat struktur perekonomian. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan (riil) disusun berdasarkan harga pada tahun dasar dan bertujuan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi.

Perbandingan PDRB atas dasar harga berlaku terhadap PDRB atas dasar harga konstan dapat juga digunakan untuk melihat inflasi atau deflasi yang terjadi. Menurut Widodo (2006), untuk menghitung PDRB ada tiga pendekatan yang dapat digunakan, yaitu:

- a. Pendekatan produksi, maksudnya PDRB adalah jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di wilayah suatu daerah dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Nilai tambah merupakan hasil pengurangan output dengan input antara. Unit-unit produksi tersebut dikelompokkan menjadi 9 lapangan usaha (sektor), yaitu: (1) Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan, (2) Pertambangan dan Pengalihan, (3) Industri Pengolahan, (4) Listrik, Gas dan Air Bersih, (5) Bangunan, (6)

Perdagangan, Hotel dan Restoran, (7) Pengangkutan dan Komunikasi, (8) Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan, (9) Jasa-jasa termasuk jasa pelayanan pemerintah.

- b. Pendekatan pendapatan, maksudnya PDRB merupakan jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu daerah dalam jangka waktu tertentu. Balas jasa faktor produksi yang dimaksud adalah upah dan gaji (balas jasa tenaga kerja), sewa tanah (balas jasa tanah), bunga modal (balas jasa modal) dan keuntungan (balas jasa kewiraswataan), semuanya sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak langsung lainnya.
- c. Pendekatan Pengeluaran, maksudnya PDRB adalah semua komponen permintaan akhir yang terdiri dari: (1) pengeluaran konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta nirlaba, (2) konsumsi pemerintah, (3) pembentukan modal tetap domestik bruto, (4) perubahan stok, dan (5) ekspor netto (ekspor dikurangi impor).

F. Pengembangan Sektor Unggulan Sebagai Strategi Pembangunan Daerah

Menurut Arsyad (2005), permasalahan pokok dalam pembangunan daerah adalah terletak pada penekanan kebijakan-kebijakan pembangunan yang didasarkan pada kekhasan daerah yang bersangkutan (*endogenous depelovment*) dengan menggunakan potensi sumberdaya manusia, kelembagaan, dan sumberdaya fisik secara lokal (daerah). Orientasi ini mengarahkan pada pengambilan inisiatif-inisiatif yang berasal dari daerah tersebut dalam proses

pembangunan untuk menciptakan kesempatan kerja dan merangsang peningkatan ekonomi.

Pembangunan ekonomi dengan mengacu pada sektor unggulan selain berdampak pada percepatan pertumbuhan ekonomi juga akan berpengaruh pada perubahan mendasar dalam struktur ekonomi. Menurut Ratnasari (2014) sektor unggulan adalah sektor atau kegiatan ekonomi yang mempunyai potensi, kinerja dan prospek yang lebih baik dibandingkan dengan sektor lainnya sehingga diharapkan mampu menggerakkan kegiatan usaha ekonomi turunan lainnya, demi terciptanya kemandirian pembangunan wilayah. Sektor unggulan dapat pula diartikan sebagai sektor yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi wilayah sekitar yang ditunjukkan dengan parameter-parameter seperti:

1. Sumbangan sektor perekonomian terhadap perekonomian wilayah yang cukup tinggi.
2. Sektor yang mempunyai dampak pengganda (*multiplier effect*) yang tinggi.
3. Sektor yang kandungan depositnya melimpah.
4. Memiliki potensi *added value* yang cukup baik.

Menurut Safi'i (2007), paradigma baru strategi pembangunan ekonomi daerah mencakup beberapa hal berikut, yaitu:

1. Pembangunan dilakukan dengan mempertimbangkan potensi daerah bersangkutan, serta kebutuhan dan kemampuan daerah menjalankan pembangunan.

2. Pembangunan daerah tidak hanya terkait dengan sektor ekonomi semata melainkan keberhasilannya juga terkait dengan faktor lainnya seperti sosial, politik, hukum, budaya, birokrasi dan lainnya.
3. Pembangunan dilakukan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas dan yang memiliki pengaruh untuk menggerakkan sektor lainnya secara lebih cepat.

Dengan mengetahui tujuan dan sasaran pembangunan, serta kekuatan dan kelemahan yang dimiliki suatu daerah, maka strategi pengembangan potensi yang ada akan lebih terarah dan strategi tersebut akan menjadi pedoman bagi pemerintah daerah atau siapa saja yang akan melaksanakan usaha di daerah tersebut. Oleh karena itu, langkah-langkah berikut dapat dijadikan acuan dalam mempersiapkan strategi pengembangan potensi yang ada di daerah, yaitu:

1. Mengidentifikasi sektor-sektor kegiatan mana yang mempunyai potensi untuk dikembangkan dengan memperhatikan kekuatan dan kelemahan masing-masing sektor.
2. Mengidentifikasi sektor-sektor yang potensinya rendah untuk dikembangkan serta mencari faktor-faktor penyebab rendahnya potensi sektor tersebut untuk dikembangkan.
3. Mengidentifikasi sumberdaya (faktor-faktor produksi) yang ada termasuk sumberdaya manusianya yang siap digunakan untuk mendukung perkembangan setiap sektor yang bersangkutan.
4. Dengan model pembobotan terhadap variabel - variabel kekuatan dan kelemahan untuk setiap sektor dan sub-sektor, maka akan ditemukan sektor-

sektor unggulan yang selanjutnya dianggap sebagai potensi ekonomi yang patut dikembangkan di daerah yang bersangkutan.

5. Menentukan strategi yang akan ditempuh untuk pengembangan sektorsektor andalan yang diharapkan dapat menarik sektor-sektor lain untuk tumbuh sehingga perekonomian akan dapat berkembang dengan sendirinya secara berkelanjutan.

G. Perubahan Struktur Ekonomi

Keberhasilan pembangunan yang didorong dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi sering menyebabkan pergeseran struktur ekonomi. Indikasi perubahan struktur ekonomi dapat dilihat dengan pergeseran peranan atau perubahan sektor primer (pertanian dan pertambangan) terhadap produk domestik bruto yang semakin berkurang diikuti dengan pergeseran peranan sektor sekunder (industri, listrik gas air, dan konstruksi) dan sektor tersier (perdagangan hotel restoran, pengangkutan komunikasi, keuangan, dan jasa) yang cenderung meningkat (Yunisvita, 2011). Dengan kata lain, pembangunan (ekonomi) dalam jangka panjang akan membawa serangkaian perubahan mendasar dalam struktur ekonomi suatu negara atau disebut transformasi ekonomi, yang semula lebih bersifat subsisten dan menitikberatkan pada sektor primer menuju ke struktur perekonomian yang lebih modern yang didominasi oleh sektor sekunder dan tersier (Jumadi, 2015).

Teori perubahan struktural menitikberatkan pembahasan pada mekanisme transformasi ekonomi yang dialami oleh negara-negara sedang berkembang yang semula bersifat subsisten dan menitikberatkan sektor pertanian menuju struktur

perekonomian yang didominasi sektor non primer, khususnya industri. Lewis (1954) dengan teori surplus tenaga kerja dua sektor (*two sector surplus labor*) sebagaimana diacu (Jhinghan 2003) membahas proses pembangunan ekonomi yang terjadi di pedesaan dan perkotaan (*urban*). Di pedesaan terjadi kelebihan suplai tenaga kerja ditandai dengan nilai produk marjinalnya nol dan tingkat upah riil yang rendah, sedangkan perkotaan dicirikan dengan sektor industri modern dengan tingkat produktivitas tinggi dan menjadi tempat penampungan tenaga kerja dari sektor subsisten di pedesaan. Teori pola pembangunan oleh Chenery dan Syrquin (Kuncoro 2016) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi dalam jangka waktu panjang akan menyebabkan kontribusi sektor pertanian terhadap pembentukan output dan penyerapan tenaga kerja semakin menurun, sedangkan kontribusi sektor industri pengolahan akan semakin meningkat.

H. Teori Metode *Location Quotient (LQ)* dan *Dynamic Location Quotient*

(DLQ)

Metode *Location Quotient (LQ)* digunakan untuk membandingkan kemampuan sektor-sektor perekonomian di suatu wilayah dengan kemampuan sektor perekonomian di wilayah yang lebih luas. *LQ* dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut (Riyadi dan Brathakusuma, 2005):

$$LQ = \frac{v_i / v_t}{V_i / V_t}$$

Keterangan:

v_i : PDRB sektor/sub sektor Kabupaten/Kota

v_t : PDRB total wilayah Kabupaten/Kota

V_i : PDRB sektor/sub sektor tingkat Provinsi

V_t : PDRB total wilayah tingkat Provinsi

Istilah wilayah nasional dapat diartikan untuk wilayah induk/wilayah atasan. Apabila diperbandingkan antara wilayah kabupaten dengan wilayah provinsi, maka provinsi memegang peranan sebagai wilayah nasional. Dari rumus tersebut dapat diketahui kriteria nilai LQ , sebagai berikut:

$LQ > 1$, artinya produk sektor i mampu memenuhi kebutuhan daerah yang bersangkutan serta mampu mengekspor ke luar daerah.

$LQ < 1$, artinya produk sektor i belum mampu memenuhi kebutuhan daerah yang bersangkutan dan masih mengimpor dari daerah lain.

$LQ = 1$, artinya terjadi keseimbangan antara kebutuhan dengan produk yang dihasilkan oleh sektor terkait.

Kelemahan metode LQ yaitu analisisnya yang bersifat tetap sehingga tidak menggambarkan kemungkinan perubahan-perubahan yang terjadi untuk waktu yang akan datang. Karena sektor unggulan pada saat ini belum tentu akan menjadi sektor unggulan pada masa yang akan datang dan juga sebaliknya sektor non unggulan pada saat ini mungkin akan berubah menjadi sektor unggulan pada waktu yang akan datang, karena perhitungan metode LQ hanya untuk mengetahui sektor unggulan dan non unggulan secara tetap tanpa adanya perubahan-perubahan yang terjadi di masa yang akan datang, maka untuk mengatasi kelemahan metode LQ digunakan variasi dari metode LQ yaitu *Dynamic Location Quotient (DLQ)*. Metode DLQ menggambarkan posisi sektor maupun sub sektor pertanian dimasa mendatang. Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut: DLQ

$$= \left\{ \frac{(1+g_{ij})/(1+g_j)}{(1+G_i)/(1+G)} \right\}^t$$

Dimana:

DLQ : Indeks Dynamic Location Quotient

g_{ij} : Rata-rata laju pertumbuhan sektor/sub sektor Kab/Kota

g_j : Rata-rata laju pertumbuhan PDRB Kab/Kota

G_i : Rata-rata laju pertumbuhan sektor/sub sektor Provinsi

G : Rata-rata laju pertumbuhan PDRB seluruh sektor Provinsi

t : Jumlah tahun dianalisis

Jika $DLQ > 1$, sektor maupun sub sektor pertanian masih dapat diharapkan untuk unggulan di masa yang akan datang.

Jika $DLQ < 1$, sektor maupun sub sektor pertanian tidak dapat diharapkan untuk unggulan di masa yang akan datang (Suyatno, 2002).

I. Teori Klassen Typologi (KT)

Menurut Sjafrizal (1997), *Typologi Klassen* merupakan alat analisis yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi sektor, subsektor, usaha, atau komoditi prioritas atau unggulan suatu daerah. Alat analisis ini dapat digunakan melalui dua pendekatan, yang pertama adalah dengan pendekatan sektoral sedangkan pendekatan yang kedua adalah dengan pendekatan wilayah/daerah seperti yang untuk mengetahui klasifikasi daerah berdasarkan dua indikator utama, yaitu pertumbuhan ekonomi dan pendapatan atau Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita daerah.

Pendekatan wilayah menurut (Sjafrizal 20018) menghasilkan empat klasifikasi kabupaten/kota yang masing-masing mempunyai karakteristik pertumbuhan ekonomi yang berbeda yaitu:

1. Sektor yang maju dan tumbuh dengan pesat (*Developed Sector*/Kuadran I)

Kuadran ini merupakan kuadran yang laju pertumbuhan sektor tertentu dalam PDRB (s_i) yang lebih besar dibandingkan laju pertumbuhan sektor tersebut dalam PDRB daerah yang menjadi referensi (S) dan memiliki nilai kontribusi sektor terhadap PDRB (s_{ki}) yang lebih besar dibandingkan kontribusi sektor tersebut terhadap PDRB daerah yang menjadi referensi (SK). Klasifikasi ini dilambangkan dengan $s_i > S$ dan $s_{ki} > SK$.

2. Sektor maju tapi tertekan (*Stagnant Sector*/Kuadran II)

Kuadran ini merupakan kuadran yang laju pertumbuhan sektor tertentu dalam PDRB (s_i) yang lebih kecil dibandingkan laju pertumbuhan sektor tersebut dalam PDRB daerah yang menjadi referensi (S), tetapi memiliki nilai kontribusi sektor terhadap PDRB (s_{ki}) yang lebih besar dibandingkan kontribusi sektor tersebut terhadap PDRB daerah yang menjadi referensi (SK). Klasifikasi ini dilambangkan dengan $s_i < S$ dan $s_{ki} > SK$.

3. Sektor potensial atau masih dapat berkembang (*Developing Sector*/ Kuadran III)

Kuadran ini merupakan kuadran yang laju pertumbuhan sektor tertentu dalam PDRB (s_i) yang lebih besar dibandingkan laju pertumbuhan sektor tersebut dalam PDRB daerah yang menjadi referensi (S), tetapi memiliki nilai kontribusi sektor terhadap PDRB (s_{ki}) yang lebih kecil dibandingkan kontribusi sektor tersebut terhadap PDRB daerah yang menjadi referensi (SK). Klasifikasi ini dilambangkan dengan $s_i > S$ dan $s_{ki} < SK$.

4. Sektor relatif tertinggal (*Underdeveloped Sector*/Kuadran IV).

Kuadran ini merupakan kuadran yang laju pertumbuhan sektor tertentu dalam PDRB (si) yang lebih kecil dibandingkan laju pertumbuhan sektor tersebut dalam PDRB daerah yang menjadi referensi (S) dan sekaligus memiliki nilai kontribusi sektor terhadap PDRB (ski) yang lebih kecil dibandingkan kontribusi sektor tersebut terhadap PDRB daerah yang menjadi referensi (SK). Klasifikasi ini dilambangkan dengan $si < S$ dan $ski < SK$.

Sjafrizal (2008) menyatakan pendekatan tipologi klassen digunakan untuk mengetahui gambaran tentang pola dan struktur ekonomi masing-masing daerah. Tipologi klassen digunakan untuk mengetahui klasifikasi daerah berdasarkan dua indikator utama, yaitu pertumbuhan ekonomi dan pendapatan atau produk domestik regional bruto (PDRB) per kapita daerah, dengan menentukan rata-rata pertumbuhan ekonomi sebagai sumbu vertikal dan rata-rata PDRB per kapita sebagai sumbu horizontal.

J. Penelitian Terdahulu

Tabel 3. Rangkuman Penelitian Terdahulu

No.	Judul, Nama, Tahun	Metode dan Hasil Penelitian
1.	Pengembangan Sektor-sektor Ekonomi Di Tiap Kecamatan di Kabupaten Magelang, Adhitama, 2012	Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa sektor jasa, sektor pertanian dan sektor perdagangan, hotel dan restoran di Kabupaten Magelang mendominasi sektor unggulan yang ada di tiap kecamatan di Kabupaten Magelang. Tercatat terdapat 9 kecamatan yang memiliki sektor unggulan disektor jasa yaitu Kecamatan Windusari, Dukun, Ngluwar, Salaman, Muntilan, Secang, Tegalrejo, Ngablak, dan Pakis. 8 kecamatan yang memiliki keunggulan disektor pertanian yaitu Kecamatan Kajoran, Bandongan, Borobudur, Tegalrejo, Sawangan, Pakis, Srumbung dan Ngablak. 7 kecamatan yang memiliki keunggulan disektor perdagangan, hotel dan restoran yaitu Kecamatan Borobudur, Mungkid, Candimulyo, Mertoyudan, Sawangan dan Kecamatan Secang.
2.	Penentuan Komoditas Unggulan dan Struktur Komoditas Hortikultura Kecamatan Tinggimoncong Kabupaten Gowa berdasarkan <i>Location Quotient (LQ)</i> dan <i>Klassen Typology (KT)</i> , Fatmasari, 2018	Berdasarkan hasil analisis <i>Location Quotient</i> komoditi unggulan Kecamatan Tinggimoncong yang harus mendapatkan perhatian lebih dalam pengelolaan dan perkembangannya adalah markisa (LQ=1,03), kentang (LQ=4,01), tomat (LQ=3), wortel (LQ=1,51), kubis (LQ=1,30), sawi putih (LQ=1,04) dan pisang (LQ=1,1). Berdasarkan analisis <i>Klassen Typologi</i> struktur pertumbuhan komoditi unggulan hortikultura di Kecamatan Tinggimoncong tersebut, komoditi yang tergolong maju dan bertumbuh cepat adalah markisa, kentang dan tomat, komoditi yang maju dan bertumbuh tapi lambat adalah wortel, sawi putih dan kubis, serta komoditi yang termasuk unggulan tetapi relatif tertinggal dari kecamatan lain adalah pisang.

<p>3. Analisis Peran Sektor Pertanian dalam Meningkatkan Perekonomian di Kabupaten Kuningan Provinsi Jawa Barat, Gantini, 2018</p>	<p>Sub sektor pertanian yang menjadi sektor unggulan di Kabupaten Kuningan selama tahun 2013-2017 yaitu sub sektor tanaman pangan, sub sektor tanaman hortikultura, sub sektor jasa pertanian dan perburuan serta sub sektor kehutanan dan penebangan kayu. Sub sektor pertanian yang mengalami perubahan peranan di masa yang akan datang yaitu sub sektor tanaman hortikultura dari basis menjadi non basis dan sub sektor tanaman perkebunan dari non basis menjadi basis. Faktor penyebab terjadinya perubahan peranan pada sub sektor tanaman hortikultura yaitu faktor struktur perekonomian, sedangkan faktor penyebab terjadinya perubahan peranan pada sub sektor tanaman perkebunan yaitu faktor lokasi.</p>
<p>4. Analisis Location Quotient dalam Produk Unggulan pada Beberapa Sektor di Kabupaten Lingga Kepulauan Riau, Kartikaningdyah, 2012</p>	<p>Potensi unggulan di wilayah kecamatan yang ada di Kabupaten Lingga berdasarkan aspek potensi lahan pengembangan, jumlah komoditi unggulan, kontribusi terhadap PDRB kabupaten, aksesibilitas dan kelengkapan sarana prasarana produksi dan jasa adalah sektor pertanian antara lain tanaman pangan, sayuran, buah-buahan. Jenis komoditi unggulan untuk tanaman pangan adalah tanaman jagung, kacang tanah dan talas. Komoditi unggulan untuk tanaman sayuran adalah sawi, kacang panjang dan kangkung. Sedangkan komoditi unggulan untuk buah-buahan adalah mangga, rambutan, sukun, jeruk, sirsak, alpukat, salak, sawo, manggis dan durian. Jenis tanaman pangan lainnya seperti ubi kayu dan ubi jalar juga berpotensi, begitupula halnya dengan tanaman sayuran ketimun dan buncis.</p>

- | | |
|---|--|
| <p>5. <i>Determination of Potential Economic Sectors to Support Economic Development Planning</i>, Nengah, 2018</p> | <p>Berdasarkan hasil analisis LQ, masing-masing sektor di Kabupaten Bangli dari 2013 hingga 2017 menunjukkan bahwa ada tiga sektor yang nilai LQ-nya lebih besar dari satu, selanjutnya disebut sebagai sektor basis. Sektor yang merupakan sektor basis untuk Kabupaten Bangli, yaitu sektor pertanian, sektor bangunan, dan sektor jasa. Dari tiga sektor dasar Kabupaten Bangli, sektor pertanian adalah sektor dasar yang memiliki nilai LQ terbesar 1,77 sedangkan sektor bangunan adalah 1,29 dan sektor jasa adalah 1,42. Selanjutnya, akan dianalisis lebih lanjut sampai tahap komoditas dari masing-masing sektor basis tetapi sektor bangunan tidak dilanjutkan karena data yang terbatas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bangli pada periode 2013-2017 lebih lambat dari pertumbuhan ekonomi umum di Provinsi Bali. Sektor ekonomi potensial yang digunakan sebagai sektor utama adalah sektor pertanian dan sektor jasa.</p> |
| <p>6. <i>Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB Kabupaten Jember Tahun 2012-2016</i>, Putra, 2018</p> | <p>Sektor pertanian menyumbang terbesar terhadap PDRB meskipun setelah diramal kedepannya akan terjadi penurunan, namun besarnya kontribusi sektor pertanian ini masih tetap stabil dibandingkan dengan sektor lainnya di Kabupaten Jember. Kontribusi sektor pertanian ini menjadi faktor pendukung perekonomian di Kabupaten Jember agar dapat meningkatkan sumbangannya terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di wilayah Jember. Total sumbangan atau kontribusi sektor tanaman perkebunan sebagai komoditas potensial di Kabupaten Jember berdasarkan tabel 8 diatas adalah sebesar 0,37% dari PDRB Kabupaten Jember, kemudian diikuti</p> |

oleh komoditas tanaman pangan sebagai komoditas terbesar kedua yaitu sebesar 0,26% dari PDRB Kabupaten Jember, dan terakhir diikuti komoditas peternakan sebesar 0,17% dari total PDRB Kabupaten Jember periode 2012-2016 sebagai komoditas terbesar ketiga. Total kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Kabupaten Jember adalah sebesar 1,07% selama kurun waktu 2012 hingga tahun 2016.

